



## ***Regulation and Control: The Transformation of Agriculture in the Japanese Era, 1942-1945***

Rinda Handayani

Corresponding author email: [rinda.handayani@unej.ac.id](mailto:rinda.handayani@unej.ac.id)

Universitas Jember

**Abstract:** *The Japanese presence in Indonesia (1942–1945) had a significant impact on various sectors, including the economy and agriculture. Japan implemented various policies and regulations to control the agricultural sector to meet their war needs in Java. This research aims to analyze the agricultural transformation introduced by Japan, especially in the aspects of regulation and control which include the introduction of new commodities, the application of cultivation techniques, and the formation of farmer organizations in the Java region. This research uses historical methods that include heuristics, criticism of sources (internal and external), interpretation, and historiography. The results show that although Japan's agricultural policy brings modernization through new cultivation techniques, on the other hand it also causes negative impacts, such as food scarcity and labor exploitation. Thus, the transformation of agriculture during the Japanese occupation had a complex influence on the agricultural sector in Indonesia.*

**Keywords:** *Japanese Occupation, Control, Exploitation, Agricultural Modernization.*

---

## **Regulasi dan Kontrol: Transformasi Pertanian Era Jepang di Jawa, 1942-1945**

**Abstrak:** Kehadiran Jepang di Indonesia (1942–1945) membawa dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pertanian. Jepang menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengontrol sektor pertanian guna memenuhi kebutuhan perang mereka di Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pertanian yang diperkenalkan Jepang, khususnya dalam aspek regulasi dan kontrol yang meliputi pengenalan komoditas baru, penerapan teknik budidaya, serta pembentukan organisasi tani di wilayah Jawa. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mencakup heuristik, kritik sumber (internal dan eksternal), interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pertanian Jepang membawa modernisasi melalui teknik budidaya baru, di sisi lain kebijakan ini juga menyebabkan dampak negatif, seperti kelangkaan bahan pangan dan eksploitasi tenaga kerja. Dengan demikian, transformasi pertanian pada masa pendudukan Jepang memberikan pengaruh yang kompleks terhadap sektor pertanian di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pendudukan Jepang, Kontrol, Eksploitasi, Modernisasi Pertanian.

## **PENDAHULUAN**

Pendudukan Jepang di Indonesia pada 1942–1945 membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk pertanian. Jepang menduduki Indonesia bertujuan untuk mengamankan sumber daya alam (Widodo, 2006). Sebagai bagian dari strategi militernya, Jepang memberlakukan sejumlah kebijakan yang difokuskan pada

peningkatan hasil pertanian demi memenuhi kebutuhan logistik mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, diterapkan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar sektor pertanian dapat mendukung keperluan militer Jepang. Upaya ini meliputi restrukturisasi sistem pertanian, pengenalan jenis tanaman baru, serta pembentukan kelompok-kelompok tani yang berada di bawah kendali langsung pemerintah militer Jepang. Sebelum pendudukan Jepang, sektor pertanian di Indonesia masih didominasi oleh sistem kolonial Belanda yang berorientasi pada ekspor hasil bumi seperti kopi, teh, dan tembakau. Namun, kebijakan pertanian Jepang lebih berfokus pada peningkatan produksi bahan pangan, terutama padi, guna mendukung ketahanan pangan bagi militer dan rakyat Jepang.

Berbagai teknik budidaya baru diperkenalkan untuk meningkatkan hasil pertanian, meskipun pada kenyataannya kebijakan tersebut juga disertai dengan eksploitasi tenaga kerja petani dan pengambilan hasil panen secara paksa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan kontrol yang diterapkan Jepang dalam sektor pertanian serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan metode sejarah yang mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan pertanian Jepang tidak hanya membawa modernisasi dalam teknik pertanian, tetapi juga menciptakan berbagai permasalahan, seperti kelangkaan bahan pangan dan tekanan terhadap petani.

Tema mengenai pendudukan Jepang tidak lepas dari aspek politik maupun militer. Dari aspek pertanian belum mendapat perhatian yang lebih. Penelitian ini akan menguraikan tentang kebijakan Jepang di bidang pertanian. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nawiyanto berisi tentang ekspansi Jepang di Besuki dengan memperkenalkan berbagai komoditi perkebunan seperti karet, the, kapas. Selain itu, Jepang juga memperkenalkan cara baru untuk mengolah komoditi perkebunan (Nawiyanto, 2005). Karya Van der Eng (2008) sangat berharga dalam mengisi celah kajian ekonomi sejarah Indonesia, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat selama masa transisi kekuasaan. Dengan menempatkan pangan sebagai indikator standar hidup, Van der Eng memberikan dimensi baru dalam menilai dampak pendudukan Jepang dan dekolonisasi. Namun, aspek kebaruan di bidang pertanian belum dibahas secara spesifik.

Tulisan Sato memberikan kontribusi signifikan dalam studi sejarah sosial-ekonomi Indonesia, khususnya pada masa pendudukan Jepang. Dengan menggeser perhatian dari kekerasan individual ke bentuk kekerasan struktural, Sato memperkaya

cara pandang terhadap masa pendudukan bukan hanya sebagai periode penjajahan brutal, tetapi juga sebagai sistem eksploitasi yang kompleks, Sato berhasil membongkar relasi kerja selama pendudukan Jepang sebagai bagian dari proyek besar ekonomi perang dan dominasi militer. Karyanya memperlihatkan bagaimana kebijakan dan struktur kolonial Jepang berdampak besar terhadap keseharian rakyat Indonesia dari kekurangan makanan dan pakaian, hingga kerja paksa massal yang menelan banyak korban jiwa. Artikel ini tetap menjadi bacaan penting dalam memahami sisi gelap dari proyek “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” yang digagas Jepang (Sato, 2000).

Di antara sekian banyak tema pendudukan Jepang di Jawa yang paling menonjol adalah perubahan dalam kehidupan desa. Kajian tentang pendudukan Jepang, seperti yang dilakukan oleh Aiko Kurasawa dan Shigeru Sato, telah berhasil menggambarkan perubahan sosial di pedesaan Jawa (Kurasawa, 2015; Sato, 1994). Beberapa kajian lokal memperkuat temuan Aiko Kurasawa dan Shigeru Sato mengenai perubahan besar di pedesaan Jawa. Kajian Delta Lidina Putri tentang Temanggung di Jawa Tengah, menggambarkan bahwa pemerintah militer Jepang mengerahkan tenaga kerja petani untuk upaya perang dan menerapkan kebijakan ekonomi perang yang bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya dan mengubah wilayah yang diduduki menjadi lumbung padi (Delta, 2014). Studi-studi ini menunjukkan variasi lokal dan kondisi pertanian selama pendudukan Jepang. Pola serupa kemungkinan terjadi di wilayah lain di Jawa, termasuk Kediri. Kajian dari Scott (1985) menggambarkan situasi pangan di Asia Tenggara di bawah kekuasaan Jepang, tetapi studi singkatnya belum secara mendalam membahas mengenai situasi di Indonesia.

Kajian akademik tentang pendudukan Jepang di Indonesia umumnya didominasi oleh aspek politik, militer, dan sosial-budaya. Sementara itu, aspek pertanian sebagai salah satu sektor vital dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Jawa, belum mendapatkan perhatian dari sejarawan. Padahal, masa pendudukan Jepang ditandai oleh upaya reorganisasi pertanian secara besar-besaran, baik dalam bentuk regulasi, kontrol produksi, hingga mobilisasi tenaga kerja tani untuk kepentingan perang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mencakup empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber (internal dan eksternal), interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi surat kabar dan studi

literatur yang relevan. Tahap pertama, heuristik, dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data sejarah dari sumber primer yang berasal dari surat kabar yaitu *Asia Raya* dan *Djawa Baroe*. Sementara sumber sekunder berupa artikel jurnal nasional maupun internasional dan buku referensi yang terkait dengan pembahasan. Setelah data terkumpul, dilakukan kritik sumber yang terdiri dari kritik internal dan eksternal. Kritik internal bertujuan untuk menilai kredibilitas isi sumber seperti kondisi sosial dan politik pada saat *Asia Raya* dan *Djawa Baroe* terbit. Kritik eksternal berfungsi untuk menguji keaslian atau otentisitas sumber yang diperoleh seperti tanggal terbit dan akses surat kabar tersebut berasal dari situs resmi digital KITLV.

Setelah melalui proses kritik, tahap selanjutnya adalah interpretasi, yang mencakup analisis serta sintesis data guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap peristiwa sejarah yang dikaji dari surat kabar dan artikel yang telah diperoleh. Tahap akhir adalah historiografi, yaitu penyusunan dan penulisan sejarah berdasarkan sintesis data yang telah dianalisis, sehingga menghasilkan narasi historis transformasi pertanian di Jawa era Jepang yang sistematis dan objektif. Tulisan ini menggunakan pendekatan sejarah pertanian dan perkebunan yang menempatkan sistem pertanian dan perkebunan sebagai pusat analisis dalam memahami dinamika sosial dan politik pada era Jepang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komoditi Baru**

Pada masa pemerintahan kolonial, tanaman perkebunan yang diusahakan meliputi berbagai jenis tanaman seperti tebu, tembakau, kopi, teh, kina dan karet (Karisma & Nawiyanto, 2012). Tujuan dari penanaman komoditi perkebunan tersebut adalah karena tanaman tersebut memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran Eropa. Namun, masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun telah membawa perubahan tidak hanya struktur sosial juga sisi ekonomi. Sebagian besar tema dapat dikelompokkan ke dalam dua pokok utama, yaitu "militer" dan "ekonomi." Dengan kata lain, propaganda Jepang difokuskan untuk membangkitkan semangat juang serta etos kerja rakyat Jawa, yang dianggap penting guna mendukung kelanjutan perang. Meskipun demikian, dalam menyampaikan propaganda tersebut, Jepang berusaha untuk tidak menonjolkan keuntungan bagi pihak mereka sendiri, melainkan menekankan bahwa semua upaya itu dilakukan demi keselamatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. (Kurosawa, 1987).

Karena ekonomi ekspor kolonial tidak ada lagi, sektor perkebunan pun terhenti, dan setelah beberapa lama hampir tidak ada gula dan karet yang dapat diproduksi lagi. Impor juga terhenti, yang mengakibatkan kekurangan bahan bakar dan tekstil (Poeze & Marini, 2024)

Jawa memiliki tanah yang subur dan tenaga kerja intensif merupakan kondisi yang baik untuk penanaman beras (Lucas, 2020). Pemerintah Jepang berupaya untuk mengganti tanaman perkebunan seperti teh dengan tanaman padi dan jagung untuk menghasilkan tanaman pokok (Djawa Baroe, 1 Februari 1944). Pemerintah Jepang juga mewajibkan penduduk untuk menyerahkan padi kepada negara. Pemerintah Jepang mengutamakan distribusi beras untuk kepentingan semi militer (Lucas, 2020). Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, pertanian menjadi tulang punggung ekonomi kepulauan tersebut dan dalam banyak hal menawarkan contoh mencolok tentang interaksi yang harmonis antara tanah yang subur, iklim tropis, penduduk yang rajin, dan ilmu pengetahuan, manajemen, dan modal yang diimpor. Para manajer dan pekerja terampil di perkebunan diculik, ditawan, dibunuh atau dievakuasi; kebun, peralatan irigasi, mesin, dan jalan diabaikan; dan kerangka politik yang sama sekali baru dibangun. Namun pertanian harus tetap memberi makan negara sambil menyediakan tujuh puluh persen dari nilai semua ekspor dan persentase yang lebih besar dari pendapatan nasional (De Vries, 1949).

Pemerintahan militer Jepang memperkenalkan ekonomi terencana ketat pada 1943, yang mengharuskan setiap residensi di Jawa untuk menjadi otonom secara ekonomi. Berdasarkan kuota yang diberlakukan di semua desa, petani diwajibkan untuk mentransfer rata-rata 20 persen dari panen padi mereka dengan harga dasar yang ditetapkan. Kuota harus dikirim ke penggilingan padi milik pedagang Cina, yang kemudian menjual kembali gabah ke tentara Jepang. Pada pertengahan tahun 1943, uang kolonial digantikan oleh rupiah, dan banyak sekali uang kertas baru yang beredar, yang memicu inflasi. Tekanan signifikan diberikan pada pemerintahan Jawa dan kepala desa untuk memastikan bahwa kuota tersebut terpenuhi, tetapi panen padi pada tahun 1943 sudah 400.000 ton lebih sedikit daripada tahun 1941 (Poeze & Marini, 2024). Jawa dari sisi politik dianggap maju namun sumber daya utamanya adalah manusia (Ricklefs, 1995).

Komoditas pertanian utama pada masa pendudukan militer Jepang adalah tanaman padi, kapas, rami/rosella, ramik, singkong, dan jarak. Di Karesidenan Kediri,

komoditas pertanian meliputi padi, jagung, umbi-umbian, dan kacang-kacangan (Delta, 2014). Untuk mencapai tujuannya, pemerintah pendudukan Jepang mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produksi pangan baik dengan meningkatkan produktivitas lahan maupun dengan menambah lahan pertanian untuk ditanami padi. Untuk meningkatkan produktivitas pangan, pemerintah Jepang berencana untuk memperkenalkan teknologi produksi yang lebih baik dan inovasi teknis termasuk pengenalan varietas padi unggul dan teknik budidaya baru. Hal tersebut disertai dengan perluasan lahan penanaman padi (Nawiyanto, 2005).

Keseluruhan hasil panen dari komoditas utama wajib diserahkan kepada Pemerintah Jepang (Isnaeni, 2008). Komoditas baru yang diperkenalkan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Jawa adalah tanaman kapas. Rencananya, kapas akan dibudidayakan di lahan seluas 180.000 hektar, dengan target produksi mencapai 500.000 pikul (sekitar 31.250 ton), atau sekitar setengah dari kebutuhan konsumsi tahunan (Kurasawa, 2015). Untuk merealisasikan program ini, Jepang membentuk lembaga semi-militer bernama Menka Saibai Kyokai (Lembaga Penanaman Kapas di Jawa), yang bertugas menangani penelitian, perencanaan, percobaan lapangan, penyuluhan kepada petani, pengadaan bibit dan peralatan, serta urusan administratif terkait budidaya kapas (Kurasawa, 2015).

Berdasarkan hasil kajian lembaga tersebut, wilayah Malang dan Besuki dinilai paling ideal untuk pengembangan kapas, sedangkan daerah seperti Bogor dan Priangan dianggap kurang cocok karena tingginya curah hujan tahunan (Kurasawa, 2015). Siklus budidaya kapas dari penanaman hingga panen diperkirakan memakan waktu sekitar 100 hari, dan dalam praktiknya, sekitar 1.600 gram kapas mentah dapat dihasilkan dari lahan seluas sepuluh meter persegi (Djawa Baroe, 15 Maret 1945). Selain itu, pemerintah Jepang juga mendirikan stasiun percobaan di Probolinggo untuk mendukung pengembangan kapas melalui berbagai eksperimen agronomis (Kurasawa, 2015).

Untuk mendukung program penanaman kapas, pemerintah Jepang melaksanakan berbagai upaya propaganda dan pendidikan. Mereka menunjuk seorang *shidoin* kapas yang bertugas memberikan pelatihan kepada para petani di tingkat desa dan kecamatan. Di bawah arahan para *shidoin*, penanaman kapas dilakukan secara gotong royong dengan desa atau *tonarigumi* sebagai satuan pelaksana. Pemerintah juga menyediakan bibit dan pupuk yang diperlukan dalam proses tersebut (Kurasawa, 2015). Perang membuat impor kain menjadi sulit, yang menyebabkan kekurangan bahan sandang. Oleh karena itu,

pemerintah militer Jepang memperluas wilayah penanaman kapas. Karesidenan Kediri dipilih untuk uji coba penanaman kapas, dan setelah dua tahun, menghasilkan kapas terbaik (Poesponegoro & Notosusanto, 2012).

Petani juga dipaksa menanam tanaman jarak, baik di pekarangan maupun di sepanjang pinggir jalan. Setiap rumah tangga diharuskan menanam lebih dari sepuluh tanaman jarak. Di Karesidenan Kediri, setiap keluarga diperintahkan untuk menanam tanaman jarak di separuh pekarangan mereka dan tanaman pangan di separuh pekarangan lainnya. Hal ini karena biji jarak bermanfaat sebagai bahan bakar dan pelumas untuk senjata dan mesin pesawat terbang pada masa pemerintahan militer Jepang (Asia Raya, 27 Juni 1942). Pemerintah Jepang juga menggunakan propaganda melalui surat kabar untuk menanam jarak (Asia Raya, 1 April 1944).

Tanaman jarak (*Jatropha curcas L.*) memerlukan intensitas cahaya matahari yang cukup untuk menunjang pertumbuhan optimal. Pada kondisi iklim lembab, produktivitas tanaman menurun karena pembentukan buah yang rendah dan struktur batang yang cenderung rapuh. Persiapan lahan dilakukan dengan mencangkul tanah sedalam 3–5 cm, kemudian setiap lubang tanam diisi dengan satu hingga dua biji benih. Setelah mencapai tinggi sekitar 20 cm, bibit jarak perlu dipindahkan ke media tanam yang lebih luas guna mendukung pertumbuhan lebih lanjut. Pemupukan dilakukan saat tanaman mencapai tinggi 50 cm, menggunakan pupuk organik seperti kotoran sapi, kuda, atau kerbau yang telah difermentasi, serta ditambah daun-daun yang telah membusuk. Selain itu, air rendaman beras dapat digunakan sebagai alternatif penyiraman untuk meningkatkan kesuburan tanah. Penyiangan secara berkala diperlukan untuk menghilangkan gulma seperti rumput liar dan alang-alang sebagai pengganggu pertumbuhan tanaman. Setiap pohon jarak berpotensi menghasilkan 300 hingga 500 buah. Buah jarak yang telah matang ditandai dengan perubahan warna menjadi hitam dan akan gugur secara alami. (Asia Raya, 4 April 1944).

Pemerintah Jepang menggagas proyek irigasi dan drainase. Di beberapa wilayah Asia Tenggara, khususnya Jawa, ada investasi besar pemerintah dalam sistem irigasi, yang menyebabkan peningkatan penanaman ganda, tetapi sedikit perubahan dalam hasil panen (Both & Den, 2017). Salah satu proyek irigasi yang dibangun yaitu Terowongan Neyama di Karesidenan Kediri pada 1942. Proyek ini bertujuan untuk mengalirkan air dari daerah rawa ke Samudra Hindia dan mencegah banjir di daerah hilir Sungai Brantas, khususnya di wilayah pesisir selatan Kediri, termasuk Kabupaten Tulungagung. Proyek

ini membutuhkan sekitar 750.000 hingga 20.000 romusha (pekerja paksa) dari daerah sekitar (Kurasawa, 2015). Proyek Terowongan Neyama dimulai pada bulan Februari 1943 dan selesai pada bulan Juli 1944, dengan mempekerjakan sekitar dua juta pekerja. Semua pekerjaan dilakukan secara manual karena belum ada peralatan yang memadai (Sato, 1998). Di wilayah lain, Pemerintah Jepang bersama Pemerintah Pakualaman Kotji berupaya untuk memperlebar dan memperbesar tanggul di sepanjang sungai Serang (Asia Raya, 1 April 1944).

Pada musim kemarau, ketika pasokan irigasi terbatas, tanaman palawija seperti singkong, kacang tanah, kedelai, ubi jalar, dan jagung lebih disukai oleh petani untuk memastikan tanah mereka terus menghasilkan hasil panen untuk mendukung mata pencaharian mereka (Asia Raya, 31 Maret 1943). Namun, tanaman palawija tetap dibudidayakan karena sangat penting bagi petani, terutama dalam beradaptasi dengan pola musim. Tidak seperti padi, tanaman palawija bukanlah fokus utama pemerintah militer Jepang (Delta, 2014).

Panen dan penumbukan padi merupakan sumber pendapatan penting, terutama bagi perempuan yang tinggal di rumah tangga tanpa tanah. Ketika penggilingan padi bermunculan, pedagang beras muncul di desa-desa dan membeli hasil panen dari petani besar saat padi masih tumbuh di ladang. Mereka mendatangkan gerombolan pemanen dari luar, dan merampas sumber pendapatan banyak perempuan setempat. Pembelian beras oleh orang luar juga menyebabkan kenaikan harga. Petani besar mendapat untung darinya, tetapi konsumen pedesaan kecil, termasuk petani tanpa tanah merupakan mayoritas penduduk pedesaan, menderita akibat gabungan dari penurunan pendapatan, penurunan ketersediaan pangan, dan kenaikan harga pangan (Sato, 2016).

Beban ekonomi ketika pendudukan Jepang meningkat dibandingkan dengan masa Kolonial. Jepang menggunakan kaum elit birokrat dan tokoh-tokoh rakyat untuk politik penjajahannya sehingga memberatkan lapisan bawah (Lucas, 2020). Sejalan dengan kegiatan militer, pemerintah militer Jepang mengambil alih seluruh sektor kegiatan dan pengawasan ekonomi. Adapun kontrol yang dilakukan oleh Jepang seperti pengawasan dan penggunaan barang sisa peredaran barang.

### **Pembentukan Organisasi Pertanian**

Selama pendudukan Jepang, peran terpenting pemerintah daerah adalah mengendalikan produksi dan distribusi kebutuhan pokok sehari-hari serta memobilisasi

tenaga kerja (Post, 2010) Salah satu tujuan terpenting pemerintahan militer Jepang dalam melaksanakan perang adalah menjadikan Jawa sebagai basis pasokan pangan bagi tentara Jepang di Asia Tenggara dan membangun swasembada produksi pangan di wilayah pendudukan. Jepang menganggap bahwa Jawa dengan tanahnya yang subur dan penduduknya yang padat, Jawa memiliki kapasitas yang tinggi dalam produksi pangan terutama beras. (Nawiyanto, 2005).

Sejalan dengan keamanan, pemerintah militer jepang mengambil langkah pengawasan terhadap sektor ekonomi. Di sektor perkebunan, dikeluarkan Undang-undang No. 22/1942 yang menyatakan bahwa gunseikan (kepala pemerintahan militer) langsung mengawasi perkebunan kopi, kina, karet dan teh. Pelaksanaan pengawasan perkebunan dilaksanakan oleh sebuah badan pengawas yang dibentuk oleh gunseikan bernama Saibai Kigyo Kanrikodan (SKK). Selain bertindak sebagai pengawas, juga bertindak sebagai pemegang monopoli pembelian dan menentukan harga penjualan (Notosusanto, 1977). Dasar pembentukan ini adalah agar pemerintahan dapat berjalan dan mencegah kekacauan (Fadli & Kumalasari, 2019). Pendudukan Jepang memiliki dampak signifikan seperti budaya militer dan disiplin bagi masyarakat Indonesia.

Terdapat dua alternatif perluasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui penciptaan lahan subur baru dari hutan dan alih fungsi perkebunan menjadi lahan produktif. Untuk menjamin kontrol atas kebutuhan pangannya, dilakukan tiga kebijakan dasar. Selain petani diperintahkan untuk menyerahkan padi secara wajib kepada koperasi desa dengan harga resmi, konsumsi beras oleh penduduk pribumi juga dikontrol ketat untuk memaksimalkan penarikan pasukan, Jepang membatasi pengiriman makanan antarkaresidenan. Pembatasan ini dimaksudkan sebagai larangan pertukaran makanan secara langsung dan tidak terkendali antarkaresidenan, daripada menghentikan sepenuhnya pertukaran (Nawiyanto, 2005).

Pada masa Jepang dibentuk sebuah lembaga yang bertujuan untuk memanipulasi seluruh struktur ekonomi pada masa perang. Di tingkat desa dibentuklah Kumiai atau koperasi gaya jepang (Lucas, 2020). Selama pendudukan, pemerintah militer Jepang mendirikan koperasi pertanian di 79 kabupaten dan 20.834 desa di Jawa dan Madura, termasuk Karesidenan Kediri (Delta, 2014). Komite tersebut dibentuk untuk mengembangkan kebijakan koperasi sebagai ketua Mohammad Hatta, Margono Djojohadikusumo, Prawoto Sumodilogo, Raden S. Suriaatmadja sebagai anggota. Dengan adanya komite tersebut memperkuat keyakinan bahwa Indonesia perlu memerintah

dirinya sendiri untuk keluar dari siklus eksploitasi kolonial (Asia Raya, 6 September 1944). Di berbagai karesidenan dibentuk berbagai koperasi tani disebut sebagai Nogyo Kumiai di Garut (Asia Raya, 6 Januari 1944), Nogyo Kumiai di Malang (Asia Raya, 1 Juni 1944), Nogyo Kumiai di Cirebon (Asia Raya, 10 Agustus 1944), Kumiai Beras Tuton di Jatibarang (Asia Raya, 17 Mei 1945).

Di Jakarta dibentuklah Nogyo HokoKai "Boedi Hadi" yang memiliki tujuan yaitu (1) memperkuat persaudaraan dikalangan petani; (2) mengurus penjualan padi dan hasil bumi lain yang diperuntukan untuk pemerintah; (3) meningkatkan usaha pertanian dengan cara memperbaiki cara mengolah dan menanam tanah, memperbaiki bibit, menambah kesuburan tanah, memperbaiki peralatan pertanian; (4) mengadakan Bank Tani untuk keperluan pertanian dan tabungan petani; (5) mengurus persediaan makanan rakyat; (6) menyediakan lumbung untuk penyimpanan bibit; (7) berupaya untuk meningkatkan pengetahuan anggota (Asia Raya, 1 April 1945).

Pada masa pendudukan Jepang dibentuklah Badan Pengawasan Pangan Pemerintah Pendudukan Jepang (Shokuryo Kanriyoku), dengan tugas yaitu mengalokasikan kuota pengiriman beras ke setiap karesidenan yang selanjutnya dibagi lagi di antara kabupaten, distrik, kecamatan, dan desa. Di tingkat desa, kuota diberlakukan secara kolektif. Untuk mengakomodasi pengumpulan padi, Pemerintah Jepang membuat lembaga yang disebut sebagai Nogyo Kumiai (Nawiyanto, 2005).

### **Eksploitasi Tenaga Kerja**

Untuk melaksanakan restrukturisasi ekonomi besar-besaran ini, pemerintah pendudukan mengambil serangkaian langkah, yang dua di antaranya sangat penting, yaitu pembentukan organisasi sosial pendukung, dan perluasan mesin administrasi. Organisasi sosial yang paling penting adalah Jawa Hōkōkai dan badan-badan afiliasinya seperti Seinendan, Keibodan, dan Fujinkai. Setelah mendirikan organisasi-organisasi di seluruh Jawa, Jepang memperluas strata bawah pemerintah daerah pada bulan Juli 1944 dengan mengangkat Kembali satu petugas untuk melaksanakan kebijakan peningkatan produksi dan satu petugas untuk melaksanakan mobilisasi tenaga kerja di setiap kantor di tingkat distrik dan sub-distrik (Post, 2010)

Kantor-kantor pemerintahan dan organisasi-organisasi sosial dimaksudkan untuk bekerja sama satu sama lain. Tugas utama pejabat pemerintahan adalah menyampaikan perintah-perintah dari otoritas yang lebih tinggi, sedangkan organisasi-

organisasi sosial melaksanakan perintah-perintah tersebut dengan melibatkan masyarakat dengan mengorganisasi mereka ke dalam kelompok-kelompok menurut jenis kelamin, usia, dan tempat tinggal. Ketika pemerintah pendudukan meluncurkan kampanye untuk mengirim beras ke pemerintah, misalnya, kantor-kantor pemerintahan mengalokasikan kuota ke setiap desa; Seinendan melakukan kampanye dan berbaris di sepanjang jalan untuk mengirim beras ke pusat-pusat pengumpulan, ibu kota karesidenan, dan bahkan ke Jakarta; dan Keibodan bertindak seperti polisi ekonomi (Post, 2010). Selain itu, latihan kemiliteran juga diberlakukan oleh Pemerintah Jepang untuk anggota tonarigumi di Surabaya (Asia Raya, 4 Maret 1944). Fujinkai terlibat dalam berbagai kegiatan pertahanan dalam negeri, termasuk latihan serangan udara, produksi kapas dan biji jarak, penyebaran keterampilan ekonomi seperti memintal dan menenun, dan mendirikan dapur umum untuk rōmusha serta rumah bordil untuk batalyon PETA di wilayah tertentu (Post, 2010)

Regimentasi yang memiliki pengaruh besar kepada sikap orang Indonesia terhadap pendudukan Jepang adalah eksploitasi tenaga kerja terhadap romusha. Pada 1944 romusha telah diorganisasikan dan dilembagakan dengan pembentukan romukyoku (kantor urusan dalam negeri) di dalam lingkungan Naimubu (Departemen Urusan Dalam Negeri). Dari peraturannya Romusha adalah suatu yang bersifat sukarela bagi laki-laki dan Perempuan masing-masing antara usia 16-20 dan antara usia 16-25 (Notosusanto, 1979). Para pemuda banyak yang tidak berpendidikan dan disuntik dengan pikiran untuk anti sekutu (Rahardjo, 1993). Penguasa Jepang dengan proyek-proyek romusha salah satunya di karesidenan Pekalongan sebagai proyek kerja paksa raksasa. Jepang memiliki dua pengerahan tenaga kerja yaitu kinrohoshi, yaitu kerja bakti yang diselenggarakan di tingkat kabupaten ke bawah; dan romusha, buruh kasar yang diorganisasikan langsung oleh penguasa militer pusat (Lucas, 2020).

Selain itu, ketika bahan makanan pokok, terutama beras, sangat langka, atau ketika kelangkaan berubah menjadi kelaparan, kecenderungan yang berlaku, yang juga umum di tempat lain (Huff, 2015). Selama perang, daerah-daerah yang kekurangan pangan di Jawa menghadapi kekurangan pangan yang semakin parah, dan akhirnya menjadi bencana. Penurunan tajam di daerah panen disebabkan oleh harga yang jauh di bawah harga pasar yang ditetapkan oleh administrator militer Jepang dan gangguan transportasi. Penurunan hasil produksi beras, dan sebagian besar makanan lainnya, khususnya berdampak di Jakarta dan Surabaya, meskipun keduanya tidak terlalu jauh

dari daerah penghasil padi. Pada bulan Oktober 1943, Jepang membagi Jawa dan Madura menjadi 17 distrik, melarang perdagangan beras di antara keduanya, dan memberikan hukuman berat kepada siapa pun yang tertangkap melanggar larangan tersebut. Kematian akibat kelaparan di Jawa diperkirakan mencapai sekitar dua hingga tiga juta, antara sekitar 4,5 persen dan 7,0 persen dari populasi (Huff, 2015).

Beberapa administrator lokal melarang impor beras ke daerah mereka. Hal ini menyebabkan kekurangan beras di daerah tertentu dan surplus di daerah lain. Setelah April 1943, ketika pemerintah pendudukan mulai melakukan penjualan beras wajib kepada pemerintah, banyak penduduk dan bupati, serta beberapa pejabat mengeluarkan larangan ekspor bahan makanan dari unit administratif mereka ke daerah lain. Hal ini menghambat kelancaran arus makanan dari produsen ke konsumen. Selama pendudukan Jepang, kecenderungan ini menjadi lebih jelas, karena otoritas karesidenan mencoba memperketat kendali mereka atas ekonomi di setiap karesidenan. Konsekuensi negatif dari hal ini terhadap penduduk yakni kekurangan pangan dan penderitaan (Post, 2010)

## **KESIMPULAN**

Kehadiran pemerintah Jepang di Jawa selama periode 1942–1945 membawa perubahan signifikan dalam sektor pertanian melalui serangkaian regulasi dan kontrol ketat. Kebijakan seperti penetapan jenis tanaman yang wajib ditanam terutama padi dan kapas diterapkan untuk mendukung kepentingan militer Jepang. Di satu sisi, Jepang memperkenalkan beberapa bentuk pembaruan di bidang pertanian, termasuk sistem pelatihan dan pendistribusian sarana produksi. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan tekanan dan kesulitan bagi masyarakat lokal, terutama dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja dan pembatasan kebebasan bertani.

Dua pandangan berbeda muncul dalam menanggapi dampak kebijakan pertanian era Jepang. Pandangan optimistis menyoroti potensi pertanian Indonesia untuk bangkit kembali pasca-perang, terutama karena kebutuhan pangan domestik dan permintaan pasar ekspor global. Sebaliknya, pandangan pesimistis menekankan tantangan besar yang harus dihadapi, seperti rendahnya harga komoditas dan dampak negatif dari siklus ekonomi global, yang menghambat pemulihan produksi dan kesejahteraan seperti masa sebelum perang. Secara keseluruhan, masa pendudukan Jepang menjadi titik penting dalam sejarah pertanian Jawa, di mana kebijakan kontrol yang ketat membawa dampak ganda antara transformasi teknis dan beban sosial-ekonomi bagi penduduk setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asia Raya. (1942, Juni 27). *Kegunaan minjak djarak*.
- Asia Raya. (1944, Agustus 10). *Tjirebon Shuu Noogyo Kumiai*.
- Asia Raya. (1944, April 1). *Memperbaiki dan memperlebar Tanggoel*.
- Asia Raya. (1944, April 1). *Tanamlah Djarak*.
- Asia Raya. (1944, April 4). *Latihan Pembelaan Tanah Djawa*.
- Asia Raya. (1944, April 4). *Memperbanyak hasil Djarak: Keterangan Goenseikanboe Sangjoboetjo*.
- Asia Raya. (1944, Januari 6). *Nogjo Koemiai di Garoet Ken*.
- Asia Raya. (1944, Juni 1). *Pertemuan besar Malang Shuu Noogyo Kumiai*.
- Asia Raya. (1944, September 6). *Menjoesoen Kembali serta memperkoeat Koperasi*.
- Asia Raya. (1945, Mei 17). *8500 Pokok Pertama Kumiai beras Toeton*.
- Booth, A., & Deng, K. (2017). Japanese colonialism in comparative perspective. *Journal of World History*, 28(1). <http://www.jstor.org/stable/44631508>
- de Vries, E. (1949). Problems of agriculture in Indonesia. *Pacific Affairs*, 22(2). <https://doi.org/10.2307/2751591>
- Denik Kharisma Sari, Nawiyanto. (2012). Kebijakan Ekonomi Jepang di Blitar Tahun 1942-1945. *Repositori Universitas Jember*.
- Djawa Baroe. (1944, Februari 1). *Daja Oepaja: Melipat gandakan hasil Makanan di Djawa*.
- Djawa Baroe. (1945, Maret 15). *Dipekarangan Toeang dapat Diboeat Saroeng*.
- Fadli, Muhammad Rijal, Dyah Kumalasari. (2019). Sikap Manis Jepang Terhadap Indonesia: Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*. 13(2). [10.17977/um020v13i22019p189](http://10.17977/um020v13i22019p189)
- Huff, G. (2015). Urban growth and change in 1940s Southeast Asia. *The Economic History Review*, 68. <http://www.jstor.org/stable/43910353>
- Isnaeni, H. F., & Apid. (2008). *Romusha: Sejarah yang terlupakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Jariyah, S., et al. (2024). Farm agriculture in the residency of Kediri during the Japanese occupation. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 29(5). <https://doi.org/10.9790/0837-2905093842>
- Kurasawa, A. (1987). Propaganda media on java under the Japanese 1942-1945. *cornell university: southeast asia program publications*, 44(44). <https://doi.org/10.2307/3351221>
- Kurasawa, A. (2015). *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan sosial di pedesaan 1942-1945*. Depok: Komunitas Bambu.
- Lidina Putri, D. (2014). Kebijakan penyerahan wajib padi di Temanggung Ken masa pendudukan Jepang (1942-1945). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Lucas, A. (2020). *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam revolusi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Nawiyanto. (2005). *The rising sun in a Javanese rice granary: Change and impact of Japanese occupation on the agriculture economy of Besuki Residency, 1942-1945*. Yogyakarta: Galang Press.
- Notosusanto, N. (1979). *Tentara PETA pada jaman pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Pamoe, R. (1993). *Tentara PETA (Pembela Tanah Air): Mengawal Proklamasi 17 Agustus 1945 mulai dari Rengasdengklok*. Jakarta.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2012). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Poeze, H., Nordholt, H. S., & Marini, G. (2024). *The Japanese occupation: Hope, exploitation and mobilisation, 1942–1945. In Merdeka: The struggle for Indonesian independence and the Republic's precarious rise, 1945–1950.* Amsterdam: Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.2307/jj.19061282.5>
- Post, P. (Ed.). (2010). *The encyclopedia of Indonesia in the Pacific War.* Leiden: Brill.
- Ricklefs, M. C. (1995). *Sejarah Indonesia modern.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sato, S. (2000). Labour relations in Japanese occupied Indonesia (CLARA Working Paper No. 8). *International Institute of Asian Studies & International Institute of Social History.* <https://hdl.handle.net/10622/CLARA008>
- Sato, S. (2006). Indonesia 1939–1942: Prelude to the Japanese occupation. *Journal of Southeast Asian Studies*, 37(2). <http://www.jstor.org/stable/20072708>
- Scott, J. C. (1985). An approach to the problems of food supply in Southeast Asia during World War II. In Martin & Milward (Eds.), *Agriculture and Food Supply in the Second World War.*
- Van der Eng, P. (2008). Food supply in Java during war and decolonisation, 1940–1950 (MPRA Paper No. 8852). *Munich Personal RePEc Archive.* <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/8852/>
- Widodo, T. (2006). From Dutch mercantilism to liberalism: Indonesian historical perspective. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 21(4).